



FORUM

KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PANCASILA

- | | |
|--|--------------------------|
| Problematika Keilmuan Di Era Milenium Ketiga | Iriyanto Widisuseno |
| Separatisme, Sentralisme, Dan Egalitarianisme | J. Kartini Soejendro |
| "Pelaksanaan Demokratisasi Dan HAM Di Era Globalisasi" | Sri suhartati astoto |
| Pendidikan Kebangsaan dan Hegemoni Globalisasi
Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional | Ellen Christiani Nugroho |
| Apresiasi Pancasila Dalam Dinamika
Pelaksanaan Otonomi Daerah | Dyah Listyorini |
| Eksistensi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Konteks Dinamika Kehidupan
Berbangsa Dan Bernegara | Haryo S. Martodirdjo |

FORUM: Kajian dan Pengembangan Pancasila

FORUM Kajian dan Pengembangan Pancasila FKDP Jawa Tengah memuat tulisan tentang Masalah Aktual dalam Perspektif Pancasila

SUSUNAN REDAKSI

Penasihat	: Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja Dr. H. AT. Soegito, SH., MH. Prof. H. Hadi Wuryan, SH.,CN., MH. Drs. Maman Rachman, M.Sc. Drs. Irianto Widisuseno, H.Hum.
Penanggung jawab	: Hasan Abdul Rozak, SH.,CN., MM.
Ketua	: Drs. Suprayogi, M.Pd.
Sekretaris	: Drs. R. Pramono Tjokrowardojo
Anggota	: Drs. Sunarto, M.Si. Dra. Ana Irhandayaningsih, M.Si. Ellen Christina, SH., M.Hum. Dra. Dyah Listyarini, SH., M.Hum.

FORUM menerima sumbangan naskah/karangan yang sesuai dengan misi Forum, redaksi dapat melakukan perubahan naskah yang dimuat untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud dan isinya

Daftar Isi

SUSUNAN REDAKSI.....	i
PENGANTAR REDAKSI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Problematika Keilmuan Di Era Milenium Ketiga	
Iriyanto Widisuseno.....	1
Separatisme, Sentralisme, Dan Egalitarianisme	
J. Kartini Soejendro.....	5
“Pelaksanaan Demokratisasi Dan HAM Di Era Globalisasi”	
Hj. Sri suhartati astoto. SH. Ms.....	9
Pendidikan Kebangsaan dan Hegemoni Globalisasi Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional	
Ellen Christiani Nugroho.....	16
Apresiasi Pancasila Dalam Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah	
Dyah Listyorini.....	25
Eksistensi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konteks Dinamika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	
Haryo S. Martodirdjo.....	27

PROBLEMATIKA KEILMUAN DI ERA MILENIUM KETIGA

Oleh : **Iriyanto Widisuseno**
(Dosen MKU. dan Pascasarjana UNDIP).

Abstraksi

Era milenium ketiga merupakan era kuantum, suatu masa pertumbuhan ilmu-ilmu empiris yang positivistik. Ilmu pengetahuan menemukan otonominya untuk mengembangkan diri ke arah spesialisasi. Spesialisasi menimbulkan dampak fragmentasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya. Ilmu semakin kehilangan asumsi dasar dan arah pengembangannya. Perlu sebuah kerangka paradigmatik filosofis yang berbasis budaya dan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila.

Kata-kata kunci: Era milenium ketiga, positivistik, spesialisasi, fragmentasi paradigma Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Berbagai problematika keilmuan dalam era milenium ketiga harus segera mulai diantisipasi, yaitu adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar, sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan empiris dan teknologi. Era milenium ketiga adalah era evolusi kuantum, suatu masa pertumbuhan ilmu-ilmu empiris yang positivistik: memiliki ciri dasar pemikiran yang demikian menekankan sumber kebenaran dari sudut pengalaman dan bertumpu pada cara kerja observatif, empirik, eksperimentatif dan komparatif terhadap semua gejala atau fakta.

Ilmu-ilmu pengetahuan empiris dewasa ini mendapatkan tempatnya yang sentral dalam kehidupan manusia, karena dengan temuan-temuan teknologinya yang spektakuler dapat secara riil menopang kebutuhan ekonomis. Kejadian kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh perkembangan positivisme: ilmu pengetahuan melepaskan diri dari lingkungan teologik yang bersifat mistis, ilmu pengetahuan melepaskan diri dari lingkungan metafisik yang bersifat abstrak, dan ilmu pengetahuan menemukan otonominya dalam lingkungan positivistik.

Implikasinya, ilmu pengetahuan empiris tumbuh pesat melalui teknologi yang dikembangkannya. Sebegitu tinggi dan cepatnya kemajuan yang dicapai teknologi hingga melebihi kecepatan laju proses

pertumbuhan peradaban manusia itu sendiri. Bahkan dalam dekade sekarang ini, spektakulasi teknologi telah mampu mempengaruhi bidang-bidang kehidupan manusia, hingga menyentuh sendi-sendi kehidupannya yang nyaris menggoyahkan hakekat manusia itu sendiri.

Manusia di zaman sekarang nyaris tidak lagi hidup menurut siklus alamiah yang diatur oleh ritme alam. Kehidupan manusia sekarang diatur oleh alam kedua, suatu lingkungan yang dalam arti tertentu bersifat artifisial, sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan positif berupa teknologi yang menghadapkan pada situasi ketidakberdayaan atau ketidakseimbangan kekuatan peran agama dan ilmu-ilmu humanistik dalam menjawab masalah-masalah konkrit manusia, seperti kemiskinan, kebodohan, yang membawa dampak buruk bagi pengembangan kehidupan keagamaan maupun ilmu-ilmu humaniora termasuk ilmu filsafat.

Dalam situasi demikian paradigma tentang kaidah kenetralan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menguat, dan mendorong perkembangan spesialisasi dan otonomi keilmuan. Spesialisasi dan otonomi keilmuan muncul akibat pengetahuan manusia semakin lama semakin luas dan kompleks, sementara orang merasa tidak memungkinkan lagi hanya belajar ilmu filsafat dan liberal arts seperti di abad pertengahan. Dewasa ini yang disebut pengetahuan adalah semua dan apa yang ingin

diketahui oleh manusia, berbeda dengan masa lalu yang menekankan pada pengetahuan eksistensi manusia, alam, dan determinisme sebab akibatnya. Seperti dalam abad 17 paradigma pengetahuan dilihat dari dimensi transendental, sedangkan abad 18 (modern) dimensinya berubah menjadi humanistik atau antroposentris. Perubahan ini seolah mengikuti hukum evolusi, mengalami mutasi dan transmudasi. Pengetahuan kemudian dibedakan antara yang disebut ilmu dan bukan ilmu. Ilmupun dibedakan satu sama lain bergantung pada: epistemologinya, body of knowledge, disiplin, pohon ilmu dan metodologi, dari sinilah timbul jalur spesialisasi. Kemudian spesialisasi menimbulkan fragmentasi keilmuan, seperti misalnya pemikiran dikotomis tentang ilmu: ilmu pasti (alam) dan ilmu sosial yang membawa berbagai konsekuensi dan implikasinya. Sementara otonomi menimbulkan egoisme keilmuan. Semua itu hanya menyibukkan pada persoalan-persoalan parsial dalam bidangnya yang tidak sempat tergur sapa' diantara ilmu-ilmu yang ada, sementara persoalan substansial seperti misalnya: masalah eksistensi manusia, orientasi nilai budaya paradigma keilmuan, etika keilmuan, metodologi keilmuan menjadi terlupakan. Ilmu pengetahuan yang berkembang menjadi semakin kehilangan asumsi-asumsi dasar dan arahnya.

II. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA FILOSOFIS KEILMUAN

Dalam situasi kecenderungan budaya seperti ini perlu dimunculkan kekuatan paradigmatis filosofis keilmuan yang berbasis budaya dan kepribadian bangsa. Kedudukan paradigma ini sebagai penyeimbang, memiliki fungsi evaluatif dan kritik konstruktif, sekaligus penyadaran.

Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma diartikan sebagai model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Kuhn memandang, bahwa pengetahuan ilmuwan pada masa tertentu di dominasi oleh paradigma tertentu. Setelah

tercapainya paradigma akan terdapat periode normal science, yaitu periode dimana para ilmuwan mengartikulasikan paradigma itu dan menerapkannya dalam berbagai bidang. Kejadian yang tak terelakkan yaitu timbul penyimpangan (anomali), karena paradigma yang dianut selama ini sudah tidak mampu memberikan penjelasan memadai tentang persoalan yang timbul. Situasi demikian memunculkan suatu krisis, paradigma yang ada telah kehilangan validitasnya. Puncak terjadinya krisis menimbulkan revolusi yang akan mengganti paradigma lama dengan paradigma baru.

Dalam konteks ini paradigma diartikan sebagai asumsi dasar dan teoritis yang umum, maka ia merupakan sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber azas, tolok ukur, parameter, sekaligus memberi arah dan tujuan bagi perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu termasuk pembangunan, dan gerakan reformasi.

Untuk menyikapi dampak perkembangan IPTEKS dewasa ini, Pancasila sudah seharusnya dikembangkan sebagai paradigma keilmuan. Pancasila sebagai paradigma memiliki fungsi strategis dalam membangun kerangka berfikir dan penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, dan karakter yang khas.

Alasan yang mendukung untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma filosofis keilmuan adalah: (1) nilai-nilai Pancasila sudah mengakar di dalam sejarah pembentukan kehidupan kebangsaan dan budaya bangsa Indonesia, terutama sebagai pandangan hidup dan cara hidup masyarakat Indonesia; (2) secara formal telah teruji keberadaannya, terutama sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pancasila memenuhi syarat sebagai paradigma filosofis sebagaimana dianjurkan Kuhn, yaitu: sumber nilai, hukum dan metodologi.

Mengingat bahwa teori bersifat dinamis, artinya teori dapat mengalami perubahan sebagai akibat adanya temuan-temuan baru, ilmuwan harus siap mengkaji kembali dasar ontologis ilmu tersebut, yang membawa

konsekuensi bagi perubahan dasar epistemologis dan aksiologis keilmuannya.

Meskipun ilmu sifatnya tentatif, namun ia memiliki sejumlah kaidah keilmuannya: Objektif, rasional, kritis, metodis dan sistematis. Kaidah keilmuan inilah yang mengangkat kemajuan ilmu pengetahuan ke arah teknologi, dalam puncak perkembangannya dijadikan dasar kaidah kenetralan IPTEKS terhadap kaidah di luar kaidah sendiri. Dampaknya ialah terjadi spesialisasi yang cenderung fragmented, setiap ilmu sibuk dan hanya berurusan dengan persoalan sendiri, namun masing-masing selalu mengklaim dengan cara itu telah menyelesaikan semua persoalan hidup manusia. Ilmu pengetahuan semakin kehilangan asumsi dasar dan arah pengembangannya. Semua ini membawa akibat bagi kehidupan manusia.

Peran Pancasila sebagai paradigma filosofis keilmuan harus sampai pada kesadaran, bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan hanyalah akan menjebak dirinya kepada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidahnya sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan kerangka acuan di luar dirinya sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai-nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya (Sudjatmoko, 1984: 276).

Sila Ketuhanan YME, melengkap ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irrasional, antara rasa dan akal. Berdiri di atas sila ini ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. Sila ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan pusatnya dan tujuannya, serta menuntut tanggungjawab sosial dan intergenerasional dari para ilmuwan dan teknologi.

Sila kemanusiaan yang adil beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya yang semula, yaitu untuk

kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan atau sektor tertentu. Keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya terpesonal pada kemungkinan yang dapat dijadikan kenyataan, tetapi harus memperhatikan keadilan dan keadaban

Sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas harus dijamin, tetapi tidak mengganggu integrasi.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal hasil-hasilnya. Orang-orang awam lebih eksper untuk mempertimbangkan mana yang baik, benar dan bagus.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu : (1) keadilan distributif; (2) keadilan kontributif; (3) keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang tidak tergantikan oleh kreativitas dan individualitas, tidak hanya karena dasar hukum dan psikologi tetapi juga genetis, psikologis, biokimiawi, kronobiologis dan biografis (T. Jacob, 1993: 43-44). Pokok-pokok yang dituntut oleh Pancasila adalah bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi filosofis pada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka terhadap kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi tuntutan peradaban manusia.

III. KESIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era milenium ketiga ini harus terus berjalan, namun seiring dengan laju perkembangan peradaban manusia. Perkembangan IPTEKS bukan semata-mata kebutuhan kebutuhannya sendiri, tetapi lebih mengadibkan kebutuhan peradaban manusia demi eksistensi kemanusiaannya. Komunikasi

interdisipliner dan transdisipliner perlu terus dikembangkan, terutama IPTEKS dan ilmu-ilmu humaniora, ilmu sosial dan agama. Hal ini untuk mengeliminasi penajaman sekat-sekat yang semu di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dewasa ini terjadi ketidakpastian tapal batasnya. Sudah waktunya sekarang untuk meninggalkan egoisme keilmuan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Soejatmoko, 1984, *Etika Pembebasan*, LP3ES, Jakarta.

T. Jacob, 1993, *Manusia, Ilmu dan Teknologi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.